



*Jateng*  
gayeng

**TETEP!**  
*Mboten Korupsi  
Mboten Ngapusi*

**LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



## DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.</b>	
<b>II</b>	<b>Neraca Komparatif SKPD.</b>	
<b>III</b>	<b>Laporan Realisasi Anggaran SKPD.</b>	
<b>III</b>	<b>Laporan Operasional.</b>	
<b>III</b>	<b>Laporan Perubahan Ekuitas</b>	
	<b>Catatan Atas Laporan Keuangan</b>	
<b>Bab 1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
	1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	7
<b>Bab 2</b>	<b>Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan</b>	<b>9</b>
	2.1. Ekonomi Makro	9
	2.2. Kebijakan Keuangan	11
<b>Bab 3</b>	<b>Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan</b>	<b>16</b>
	3.1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	16
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	31
<b>Bab 4</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b>	<b>33</b>
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	33
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	33
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	34
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD	35
<b>Bab 5</b>	<b>Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan</b>	<b>49</b>
	5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca	
	5.1.1. Aset	
	5.1.2. Kewajiban	

5.1.3. Ekuitas Dana	
5.2. Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran	
5.2.1. Pendapatan	
5.2.2. Belanja	
5.3. Penjelan Pos-Pos Laporan Operasional	
5.3.1. Pendapatan	
5.3.2. Beban	
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	
<b>Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan</b>	<b>84</b>
<b>Bab 7 Penutup</b>	<b>90</b>
Lampiran Tambahan	91



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Januari 2019

**PENGGUNA ANGGARAN**

  
Dr. Ir. SRI PURYONO K.S., MP  
NIP. 19600209198603 1 004

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Peraturan tersebut mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun laporan keuangan akhir tahun selambat-lambatnya 1 bulan sejak periode tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan keuangan dimaksud meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, termasuk pula penyajian informasi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban dan komitmen-komitmen lainnya.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD**

Laporan Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

### **1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### **2. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

### **3. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### **4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola oleh Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
8. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
9. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Adapun Laporan Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

## **2. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Aset Lainnya
8. Kewajiban jangka pendek
9. Kewajiban jangka panjang
10. Ekuitas

## **3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO



#### **4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

#### **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
  14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

- BAB I      Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II     Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
- BAB III    Ikhtisan Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
  - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV     Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari  
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran Akuntansi yang Mendasari  
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan  
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi  
Pemerintah pada SKPD

- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
    - 5.1.1. Aset
    - 5.1.2. Kewajiban
    - 5.1.3. Ekuitas Dana
  - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.2.1. Pendapatan
    - 5.2.2. Belanja
- BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- BAB VII Penutup
- Lampiran Tambahan

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2018 mencatatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,54% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 5,43% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan triwulan laporan terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi swasta, khususnya konsumsi rumah tangga, serta investasi. Namun demikian, tingginya pertumbuhan impor luar negeri di tengah perbaikan ekspor yang relatif terbatas menjadi penahan laju perekonomian triwulan laporan untuk tumbuh lebih tinggi. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta pertanian menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2018.

Inflasi Jawa Tengah pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 2,72% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3.39% (yoy). Ditinjau kelompoknya, penurunan laju inflasi tahunan pada triwulan II 2018 dicatatkan oleh kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Sementara itu 5 (lima) kelompok lainnya mencatatkan peningkatan laju inflasi dibandingkan triwulan I 2018. Walaupun mengalami penurunan inflasi pada triwulan laporan, kelompok bahan makanan masih menjadi penyumbang utama inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah. Andil inflasi kelompok bahan makanan terhadap inflasi tahunan Jawa Tengah adalah sebesar 0,74% pada triwulan II 2018. Selanjutnya, sejalan dengan laju inflasinya yang tertinggi dibandingkan kelompok lainnya, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau menjadi kontributor kedua terbesar terhadap inflasi Jawa Tengah sebesar 0,65% pada triwulan II 2018. Sementara itu, sesuai dengan pola historisnya kelompok sandang masih menjadi kontributor terendah bagi inflasi Provinsi Jawa Tengah, sejalan dengan bobotnya terhadap keseluruhan konsumsi masyarakat Jawa Tengah.

Seiring dengan menguatnya kinerja perekonomian di Jawa Tengah pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit di Jawa Tengah juga tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu, khususnya pada sektor perekonomian utama. Lebih lanjut, peningkatan UMR 2018 serta minimnya tekanan inflasi berdampak pada

kemampuan konsumsi RT yang meningkat dan mempengaruhi kinerja korporasi dari sisi pertumbuhan penjualan. Konsumsi RT terindikasi ditopang oleh penyaluran THR, sehingga pertumbuhan kredit RT pada triwulan laporan belum setinggi triwulan lalu. Sementara dari sisi korporasi, tekanan biaya (utamanya terkait kenaikan UMR 2018 dan perkembangan nilai tukar) menahan rasio profitabilitas korporasi sehingga tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan lalu. Adapun, kinerja korporasi secara umum masih terpantau baik, mengingat rasio likuiditas dan solvabilitas masih dalam batas aman. Terkait upaya pengembangan dan akses keuangan, penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten menunjukkan akselerasi pertumbuhan. Pada triwulan laporan, pangsa kredit UMKM mencapai 40,41% dari total kredit, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.

Perkembangan indikator sistem pembayaran tunai dan non tunai di Jawa Tengah pada triwulan II 2018 mengkonfirmasi perbaikan kinerja perekonomian daerah yang relatif stabil secara triwulanan. Transaksi keuangan ritel yang diproses melalui SKNBI mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih mencatat kontraksi. Sementara itu, pengelolaan uang rupiah tercatat mengalami net outflow sebesar Rp5,46 triliun seiring dengan peningkatan aliran uang dari BI ke perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat periode Idul Fitri 2018. Pada periode yang sama, posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (inflow) pada triwulan II 2018 juga meningkat 16,28% (qtq) menjadi sebesar Rp24,38 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2018 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditinjau dari sisi pengeluaran, percepatan pertumbuhan ini diperkirakan berasal dari kegiatan konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan ekspor luar negeri yang meningkat pada akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,2%-5,6% (yoy). Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan terjadi pada dua lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan, sedangkan lapangan usaha pertanian diprediksi tumbuh melambat seiring dengan perkiraan baru dimulainya musim tanam (MT) III 2018. Di sisi lain, inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 diperkirakan mengalami sedikit peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan

laju inflasi terutama berasal dari kelompok bahan makanan, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Sesuai dengan pola historisnya, peningkatan konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan menjelang hari raya keagamaan dan libur akhir tahun.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
5. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

SETDA, terdiri atas :

A. SEKDA;

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

1. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama;
2. Biro Hukum;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat.

C. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri atas :

1. Biro Perekonomian;
2. Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam;
3. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

D. Asisten Administrasi, terdiri atas :

1. Biro Organisasi;
2. Biro Umum;
3. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sedikit berbeda dengan OPD atau badan yang lain di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memberikan kuasa kepada Kepala Biro untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tetapi untuk PPK-SKPD hanya ada di Biro Umum Selaku Sekretariat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) yaitu bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis,realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :



## 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

## 2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2018, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20 % untuk fungsi pendidikan;

- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, meliputi :
- 1) Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
  - 2) Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
  - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
  - 5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
  - 6) Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
  - 7) Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential);

- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- d. Membentuk dana cadangan.

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 1.812.174.800,- (Satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau tercapai sebesar 89,65% dari target sebesar Rp. 2.021.500.000,- (Dua milyar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut didapat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Jasa Usaha.

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 237.092.321.943,- (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau tercapai 93,55% dari target sebesar Rp. 253.452.354.000,- (Dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah). Adapun untuk data pendapatan dan belanja dari masing masing rincian adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.021.500.000</b>	<b>1.812.174.800</b>	<b>89,65</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.021.500.000</b>	<b>1.812.174.800</b>	<b>89,65</b>
<b>4.1.2</b>	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2.021.500.000</b>	<b>1.812.174.800</b>	<b>89,65</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.021.500.000</b>	<b>1.812.174.800</b>	<b>89,65</b>
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang	1.750.900.000	1.615.674.800	92,28
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa	166.650.000	113.550.000	68,14
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	103.950.000	82.950.000	79,80
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.021.500.000</b>	<b>1.812.174.800</b>	<b>89,65</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>253.452.354.000</b>	<b>237.092.321.943</b>	<b>93,55</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>93.633.104.000</b>	<b>86.400.479.652</b>	<b>92,28</b>
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>93.633.104.000</b>	<b>86.400.479.652</b>	<b>92,28</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>38.757.104.000</b>	<b>36.779.365.492</b>	<b>94,90</b>
5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns/uang Representasi	29.746.628.000	28.705.818.500	96,50
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.893.620.000	2.666.359.612	92,15

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.635.060.000	1.476.010.000	90,27
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	60.360.000	53.076.000	87,93
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.398.844.000	1.237.925.000	88,50
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.575.138.000	1.421.097.660	90,22
5.1.1.01.07	Tunjangan Pph/tunjangan Khusus	245.075.000	120.403.778	49,13
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	600.000	393.251	65,54
5.1.1.01.22	Iuran Bpjs Kesehatan	873.103.000	806.766.296	92,40
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/kematian	267.676.000	253.215.236	94,60
5.1.1.01.26	(x)-iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	16.000.000	9.575.040	59,84
5.1.1.01.27	(x)-iuran Jaminan Kematian	45.000.000	28.725.119	63,83
<b>5.1.1.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan Pns</b>	<b>54.876.000.000</b>	<b>49.621.114.160</b>	<b>90,42</b>
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	54.876.000.000	49.621.114.160	90,42
<b>5,2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>159.819.250.000</b>	<b>150.691.842.291</b>	<b>94,29</b>
<b>5.2.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.762.491.000</b>	<b>12.408.054.498</b>	<b>97,22</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium Pns</b>	<b>6.769.650.000</b>	<b>6.514.850.000</b>	<b>96,24</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.932.100.000	5.750.600.000	96,94
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	133.300.000	130.300.000	97,75
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan Skpd	623.250.000	552.950.000	88,72
5.2.1.01.07	Upah Piket	81.000.000	81.000.000	100,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>Honorarium Non Pns</b>	<b>5.992.841.000</b>	<b>5.893.204.498</b>	<b>98,34</b>
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak Tetap	2.408.400.000	2.408.400.000	100,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	61.400.000	50.400.000	82,08
5.2.1.02.06	Upah Tenaga Kerja	2.561.591.000	2.505.654.498	97,82
5.2.1.02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan	933.950.000	901.250.000	96,50
5.2.1.02.14	Upah Pekerja Seni	27.500.000	27.500.000	100,00
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>115.889.009.000</b>	<b>107.909.401.790</b>	<b>93,11</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.986.729.000</b>	<b>7.733.010.582</b>	<b>96,82</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.596.250.000	3.549.154.000	98,69
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering)	446.446.000	441.980.300	99,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.319.000	116.765.000	90,29
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	445.946.000	428.628.000	96,12
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	44.400.000	38.054.000	85,71
5.2.2.01.10	Belanja Pantry	179.161.000	170.055.500	94,92
5.2.2.01.14	Belanja Laundry	132.000.000	121.946.532	92,38
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/bahan Pelatihan/praktek	371.815.000	366.723.000	98,63
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/dokumentasi	736.445.000	694.203.750	94,26
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/cendera Mata	168.700.000	155.900.000	92,41
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/seminar/bintek/sosialisasi/lokakarya	1.661.247.000	1.574.600.500	94,78
5.2.2.01.22	Belanja Stand Pameran	75.000.000	75.000.000	100,00
<b>5.2.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/material</b>	<b>898.100.000</b>	<b>834.027.596</b>	<b>92,87</b>
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	238.500.000	235.930.200	98,92
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	155.000.000	96.376.700	62,18
5.2.2.02.08	Belanja Peralatan Kerja	74.000.000	72.300.000	97,70
5.2.2.02.09	Belanja Perlengkapan/peralatan Gedung/kantor	430.600.000	429.420.696	99,73
<b>5.2.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.473.320.000</b>	<b>15.622.453.973</b>	<b>89,41</b>
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.100.000.000	882.397.359	80,22
5.2.2.03.02	Belanja Air	540.000.000	379.805.703	70,33

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.600.000.000	4.050.713.965	88,06
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/majalah	200.000.000	91.475.000	45,74
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/faksimili/internet/intranet/tv Kabel/tv Satelit	296.000.000	258.112.730	87,20
5.2.2.03.07	Belanja Paket/pengiriman	5.320.000	392.000	7,37
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	160.000.000	160.000.000	100,00
5.2.2.03.13	Belanja Iuran/pbb/pasport/fiskal	640.000.000	564.271.616	88,17
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.229.000.000	1.203.619.000	97,93
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/instruktur/narasumber/tenaga Ahli	5.786.950.000	5.346.200.000	92,38
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengawalan	418.000.000	334.950.000	80,13
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Keamanan	795.000.000	697.001.700	87,67
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Medical Check Up Kdh/wkdh Dan Dprd	50.000.000	4.201.000	8,40
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pengemudi	199.800.000	199.594.000	99,90
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Teknis	1.441.650.000	1.440.419.900	99,91
5.2.2.03.35	Belanja Perkara Hukum	11.600.000	9.300.000	80,17
<b>5.2.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>745.000.000</b>	<b>708.386.873</b>	<b>95,09</b>
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	685.000.000	651.835.247	95,16
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non Pns	60.000.000	56.551.626	94,25
<b>5.2.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4.732.000.000</b>	<b>4.221.518.917</b>	<b>89,21</b>
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.524.500.000	2.402.243.233	95,16
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas Dan Pelumas	1.893.610.000	1.583.781.784	83,64
5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	13.200.000	1.368.000	10,36
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.690.000	234.125.900	77,86
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2.945.292.000</b>	<b>2.703.679.270</b>	<b>91,80</b>
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.940.497.000	1.788.853.160	92,19
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.004.795.000	914.826.110	91,05
<b>5.2.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir</b>	<b>5.158.820.000</b>	<b>4.775.353.841</b>	<b>92,57</b>
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat	289.300.000	271.871.600	93,98
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan	243.700.000	209.470.000	85,95
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Kamar/akomodasi	497.840.000	472.358.241	94,88
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Hotel	4.127.980.000	3.821.654.000	92,58
<b>5.2.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>334.000.000</b>	<b>328.966.000</b>	<b>98,49</b>
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	334.000.000	328.966.000	98,49
<b>5.2.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.907.370.000</b>	<b>2.742.362.000</b>	<b>94,32</b>
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	339.805.000	313.192.000	92,17
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	230.600.000	219.400.000	95,14
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.305.965.000	1.254.580.000	96,07
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/tradisional	64.000.000	59.250.000	92,58
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Partisi	75.000.000	63.750.000	85,00
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	862.000.000	806.690.000	93,58
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	30.000.000	25.500.000	85,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>13.798.340.000</b>	<b>13.501.876.745</b>	<b>97,85</b>
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.747.135.000	2.616.282.020	95,24
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.262.525.000	3.245.223.070	99,47
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	7.248.680.000	7.100.516.970	97,96

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga Kdh/wkdh	540.000.000	539.854.685	99,97
<b>5.2.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya</b>	<b>408.100.000</b>	<b>378.030.000</b>	<b>92,63</b>
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas Kdh Dan Wkdh	80.200.000	61.850.000	77,12
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (psl)	99.900.000	98.980.000	99,08
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (pdu)	228.000.000	217.200.000	95,26
<b>5.2.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>106.650.000</b>	<b>103.800.000</b>	<b>97,33</b>
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	106.650.000	103.800.000	97,33
<b>5.2.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu</b>	<b>85.700.000</b>	<b>79.800.000</b>	<b>93,12</b>
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	79.900.000	74.000.000	92,62
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.800.000	5.800.000	100,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.112.514.000</b>	<b>36.269.848.426</b>	<b>92,73</b>
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.831.761.000	22.041.692.366	92,49
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.589.779.000	12.944.087.580	95,25
5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.690.974.000	1.284.068.480	75,94
<b>5.2.2.17</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100.450.000</b>	<b>66,97</b>
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/pelatihan	150.000.000	100.450.000	66,97
<b>5.2.2.20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>17.192.134.000</b>	<b>16.076.715.317</b>	<b>93,51</b>
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	961.530.000	856.616.100	89,09
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	14.487.391.000	13.591.143.857	93,81
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	217.420.000	209.620.000	96,41
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.525.793.000	1.419.335.360	93,02
<b>5.2.2.21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>1.402.000.000</b>	<b>1.343.123.250</b>	<b>95,80</b>
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000	285.197.000	95,07
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	73.500.000	72.128.500	98,13
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	0,00
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.028.500.000	985.797.750	95,85
<b>5.2.2.27</b>	<b>Belanja Hadiah Barang</b>	<b>99.680.000</b>	<b>76.503.000</b>	<b>76,75</b>
5.2.2.27.01	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	97.700.000	74.523.000	76,28
5.2.2.27.02	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan	1.980.000	1.980.000	100,00
<b>5.2.2.30</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ masyarakat</b>	<b>353.260.000</b>	<b>309.496.000</b>	<b>87,61</b>
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi	342.260.000	298.496.000	87,21
5.2.2.30.02	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan	11.000.000	11.000.000	100,00
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>31.167.750.000</b>	<b>30.374.386.003</b>	<b>97,45</b>
<b>5.2.3.14</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Besar Darat</b>	<b>5.803.289.000</b>	<b>5.759.110.595</b>	<b>99,24</b>
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	5.803.289.000	5.759.110.595	99,24
<b>5.2.3.16</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu</b>	<b>119.000.000</b>	<b>117.500.000</b>	<b>98,74</b>
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	119.000.000	117.500.000	98,74
<b>5.2.3.17</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>9.001.000.000</b>	<b>8.931.547.163</b>	<b>99,23</b>

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	6.917.816.000	6.888.799.405	99,58
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	0,00
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.663.914.000	1.633.379.100	98,16
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	419.270.000	409.368.658	97,64
<b>5.2.3.27</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>689.502.000</b>	<b>654.425.000</b>	<b>94,91</b>
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	689.502.000	654.425.000	94,91
<b>5.2.3.28</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>11.171.582.000</b>	<b>10.835.449.645</b>	<b>96,99</b>
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.389.166.000	1.360.398.000	97,93
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.843.296.000	7.730.276.645	98,56
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	1.939.120.000	1.744.775.000	89,98
<b>5.2.3.29</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Komputer</b>	<b>1.712.564.000</b>	<b>1.514.550.000</b>	<b>88,44</b>
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.242.114.000	1.063.850.000	85,65
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	470.450.000	450.700.000	95,80
<b>5.2.3.31</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Studio</b>	<b>2.038.248.000</b>	<b>1.940.457.000</b>	<b>95,20</b>
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.038.248.000	1.940.457.000	95,20
<b>5.2.3.32</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>410.815.000</b>	<b>404.710.600</b>	<b>98,51</b>
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	410.815.000	404.710.600	98,51
<b>5.2.3.74</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik</b>	<b>200.000.000</b>	<b>198.500.000</b>	<b>99,25</b>
5.2.3.74.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan - Pengadaan instalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000	198.500.000	99,25
<b>5.2.3.82</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku</b>	<b>21.750.000</b>	<b>18.136.000</b>	<b>83,38</b>
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	15.750.000	14.055.000	89,24
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	-	-	0,00
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	3.000.000	2.111.000	70,37
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	3.000.000	1.970.000	65,67
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	-	-	0,00



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	-	-	0,00
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	-	-	0,00
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	-	-	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>253.452.354.000</b>	<b>237.092.321.943</b>	<b>93,55</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(251.430.854.000)</b>	<b>(235.280.147.143)</b>	<b>93,58</b>

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah  
Fungsi : 4.06.  
Sub Fungsi : 4.06.03  
Provinsi : Jawa Tengah

Gambaran umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Setda Tahun Anggaran 2018 lingkup biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	9.750.000.000	9.535.815.096	97,80	9.750.000.000	100,00	
2	Biro Hukum	5.800.000.000	5.797.200.000	99,95	5.800.000.000	100,00	
3	Biro Infrastruktur Dan Sda	6.077.500.000	5.852.153.297	96,29	6.077.500.000	100,00	
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	11.416.000.000	10.538.131.285	92,31	11.416.000.000	100,00	
5	Biro Organisasi	7.408.850.000	6.952.712.705	93,84	7.408.850.000	100,00	
6	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	13.625.900.000	12.721.462.013	93,36	13.625.900.000	100,00	
7	Biro Perekonomian Daerah	6.050.000.000	5.866.763.168	96,97	6.050.000.000	100,00	
8	Biro Umum	99.691.000.000	93.427.604.727	93,72	99.691.000.000	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata Belanja Langsung</b>	<b>159.819.250.000</b>	<b>150.691.842.291</b>	<b>94,29</b>	<b>159.819.250.000</b>	<b>100,00</b>	

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 secara detail adalah sebagai berikut :

### 1. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NON URUSAN (EKS BAU)</b>						
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	39.834.900,00	99,59	40.000.000,00	100,00	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	450.000.000,00	446.717.547,00	99,27	450.000.000,00	100,00	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>						
3	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	850.000.000,00	838.599.295,00	98,66	850.000.000,00	100,00	
4	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	800.000.000,00	791.799.500,00	98,97	800.000.000,00	100,00	
5	Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan	670.000.000,00	667.361.750,00	99,61	670.000.000,00	100,00	
6	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah	835.000.000,00	814.964.850,00	97,6	835.000.000,00	100,00	
7	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK di Provinsi Jawa tengah	300.000.000,00	285.876.180,00	95,29	300.000.000,00	100,00	
8	Kegiatan pengkajian usulan sinergitas pembangunan kabupaten/kota	175.000.000,00	124.790.578,00	71,31	175.000.000,00	100,00	
9	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Jawa Tengah	5.000.000.000,00	4.914.649.942,00	98,29	5.000.000.000,00	100,00	
10	Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	280.000.000,00	266.796.454,00	95,28	280.000.000,00	100,00	
11	Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	344.424.100,00	98,41	350.000.000,00	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata</b>	9.750.000.000,00	9.535.815.096,00	97,80	9.750.000.000,00	100,00	

## 2. BIRO HUKUM

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NON URUSAN (EKS BAU)</b>						
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Hukum</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100,00	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	305.000.000,00	305.000.000,00	100	305.000.000,00	100,00	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Biro Hukum</b>						
3	Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	100	1.870.000.000,00	100,00	
4	Kegiatan Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	1.050.000.000,00	1.049.500.000,00	99,95	1.050.000.000,00	100,00	
5	Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	1.220.000.000,00	1.217.700.000,00	99,81	1.220.000.000,00	100,00	
6	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan APPK	570.000.000,00	570.000.000,00	100	570.000.000,00	100,00	
7	Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum	700.000.000,00	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata</b>	<b>5.800.000.000,00</b>	<b>5.797.200.000,00</b>	<b>99,95</b>	<b>5.800.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	

## 3. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NON URUSAN (EKS BAU)</b>						
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	194.800.000,00	97,4	200.000.000,00	100,00	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	700.000.000,00	650.898.225,00	92,99	700.000.000,00	100,00	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</b>						

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Ketahanan Pangan	400.000.000,00	392.367.450,00	98,09	400.000.000,00	100,00	
4	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	350.000.000,00	337.628.289,00	96,47	350.000.000,00	100,00	
5	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1.075.000.000,00	1.019.811.236,00	94,87	1.075.000.000,00	100,00	
6	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	975.000.000,00	961.174.832,00	98,58	975.000.000,00	100,00	
7	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	898.500.000,00	891.280.325,00	99,2	898.500.000,00	100,00	
8	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	879.000.000,00	827.697.000,00	94,16	879.000.000,00	100,00	
9	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	600.000.000,00	576.495.940,00	96,08	600.000.000,00	100,00	
<b>* Jumlah/Rata-rata</b>		6.077.500.000,00	5.852.153.297,00	96,29	6.077.500.000,00	100,00	

#### 4. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NON URUSAN (EKS BAU)</b>							
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>							
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	149.832.000,00	99,89	150.000.000,00	100,00	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	400.000.000,00	258.468.597,00	64,62	400.000.000,00	100,00	
<b>Pendidikan dan Kebudayaan</b>							
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>							
3	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan	150.000.000,00	142.351.900,00	94,9	150.000.000,00	100,00	
<b>Fungsi Lainnya</b>							
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Kesejahteraan Rakyat</b>							
4	Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	1.750.000.000,00	1.738.391.280,00	99,34	1.750.000.000,00	100,00	

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan	1.300.000.000,00	1.166.197.146,00	89,71	1.300.000.000,00	100,00	
6	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit	200.000.000,00	194.497.100,00	97,25	200.000.000,00	100,00	
7	Koordinasi peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	200.000.000,00	195.929.650,00	97,96	200.000.000,00	100,00	
8	Koordinasi peningkatan kesehatan pada kelompok lansia	150.000.000,00	147.619.800,00	98,41	150.000.000,00	100,00	
9	Kegiatan Koordinasi P4GN	325.000.000,00	319.387.900,00	98,27	325.000.000,00	100,00	
10	Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	3.000.000.000,00	2.664.925.300,00	88,83	3.000.000.000,00	100,00	
11	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	215.000.000,00	201.298.332,00	93,63	215.000.000,00	100,00	
12	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana	215.000.000,00	179.805.200,00	83,63	215.000.000,00	100,00	
13	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan	215.000.000,00	200.098.350,00	93,07	215.000.000,00	100,00	
14	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	140.000.000,00	130.554.761,00	93,25	140.000.000,00	100,00	
15	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	150.000.000,00	143.684.189,00	95,79	150.000.000,00	100,00	
16	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	220.000.000,00	189.562.500,00	86,16	220.000.000,00	100,00	
17	Kegiatan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK	200.000.000,00	172.762.250,00	86,38	200.000.000,00	100,00	
18	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan	131.000.000,00	125.649.300,00	95,92	131.000.000,00	100,00	
19	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	250.000.000,00	247.827.350,00	99,13	250.000.000,00	100,00	
20	Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	494.641.000,00	98,93	500.000.000,00	100,00	
21	Kegiatan Koordinasi pengembangan kesenian dan nilai budaya	1.340.000.000,00	1.305.325.440,00	97,41	1.340.000.000,00	100,00	

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Kegiatan koordinasi bidang ketransmigrasian	215.000.000,00	169.321.940,00	78,75	215.000.000,00	100,00	
<b>* Jumlah/Rata-rata</b>		11.416.000.000,00	10.538.131.285,00	92,31	11.416.000.000,00	100,00	

## 5. BIRO ORGANISASI

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Non Urusan (Eks Bau)</b>						
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Organisasi</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.750.000	92.703.150	98,88	93.750.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah	320.000.000	294.352.789	91,99	320.000.000	100,00	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Biro Organisasi</b>						
3	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	200.000.000	157.396.250	78,7	200.000.000	100,00	
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	200.000.000	180.918.375	90,46	200.000.000	100,00	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Organisasi</b>						
5	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	850.000.000	831.559.950	97,83	850.000.000	100,00	
6	Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	450.000.000	442.773.505	98,39	450.000.000	100,00	
7	Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	700.000.000	690.453.240	98,64	700.000.000	100,00	
8	Kegiatan Fasilitasi Dan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	400.000.000	318.137.700	79,53	400.000.000	100,00	
9	Kegiatan Pendampingan Penerapan Smm Dan Sertifikasi Iso	655.100.000	588.866.700	89,89	655.100.000	100,00	
10	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dibidang Ketatalaksanaan	500.000.000	486.749.500	97,35	500.000.000	100,00	
11	Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	800.000.000	796.337.950	99,54	800.000.000	100,00	
12	Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah	390.000.000	356.810.968	91,49	390.000.000	100,00	
13	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap	450.000.000	353.478.350	78,55	450.000.000	100,00	

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemprov Jateng						
14	Kegiatan Pengembangan Ketatalaksanaan	395.000.000	384.772.125	97,41	395.000.000	100,00	
15	Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja	300.000.000	285.971.453	95,32	300.000.000	100,00	
16	Kegiatan Sistem Manajemen Informasi Organisasi	180.000.000	179.541.500	99,75	180.000.000	100,00	
17	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani	200.000.000	197.212.500	98,61	200.000.000	100,00	
18	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Jateng	200.000.000	194.185.700	97,09	200.000.000	100,00	
19	Peningkatan Disiplin Pns Setda Prov. Jateng	125.000.000	120.491.000	96,39	125.000.000	100,00	
<b>* Jumlah/Rata-rata</b>		7.408.850.000	6.952.712.705	93,84	7.408.850.000	100,00	

## 6. BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Non Urusan (Eks Bau)</b>						
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	122.000.000	118.135.000	96,83	122.000.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah	605.000.000	602.844.305	99,64	605.000.000	100,00	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						
3	Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah	225.000.000	223.324.900	99,26	225.000.000	100,00	
4	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	600.000.000	596.886.280	99,48	600.000.000	100,00	
5	Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan Dan Pemetaan Wilayah	150.000.000	143.921.000	95,95	150.000.000	100,00	
6	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	390.000.000	351.336.038	90,09	390.000.000	100,00	
7	Kegiatan Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	125.000.000	118.838.260	95,07	125.000.000	100,00	

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	255.000.000	229.192.365	89,88	255.000.000	100,00	
9	Koordinasi Percepatan Pencapaian Spm	770.300.000	760.432.750	98,72	770.300.000	100,00	
10	Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib Dan Pertanahan Terpadu	505.200.000	503.126.141	99,59	505.200.000	100,00	
	<b>Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						
11	Kegiatan Analisis Dan Penyusunan Lppd Dan Informasi Lppd	1.190.000.000	1.127.497.800	94,75	1.190.000.000	100,00	
12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing	1.725.000.000	1.513.615.000	87,75	1.725.000.000	100,00	
13	Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah	565.000.000	538.908.600	95,38	565.000.000	100,00	
14	Kegiatan Penyusunan Lppd/Lkpj Amj Gubernur Tahun 2013-2018	1.100.000.000	1.043.600.000	94,87	1.100.000.000	100,00	
15	Kegiatan Desk Pilkada Dan Proses Paw Anggota Dprd	2.000.000.000	1.994.770.276	99,74	2.000.000.000	100,00	
	<b>Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama</b>						
16	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	1.698.400.000	1.595.002.698	93,91	1.698.400.000	100,00	
17	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri	1.600.000.000	1.260.030.600	78,75	1.600.000.000	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata</b>	13.625.900.000	12.721.462.013	93,36	13.625.900.000	100,00	

## 7. BIRO PEREKONOMIAN DAERAH

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NON URUSAN (EKS BAU)</b>						
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Perekonomian Daerah</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100,00	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	330.000.000,00	325.594.250,00	98,66	330.000.000,00	100,00	
	<b>Keuangan</b>						



NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>						
3	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Keuangan	700.000.000,00	685.074.276,00	97,87	700.000.000,00	100,00	
4	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Jasa Produksi	500.000.000,00	465.378.962,00	93,08	500.000.000,00	100,00	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Perekonomian Daerah</b>						
5	Kegiatan Koordinasi Bidang Investasi	250.000.000,00	235.749.494,00	94,3	250.000.000,00	100,00	
6	Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.	500.000.000,00	463.613.125,00	92,72	500.000.000,00	100,00	
7	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM	800.000.000,00	783.296.300,00	97,91	800.000.000,00	100,00	
8	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa	850.000.000,00	843.141.800,00	99,19	850.000.000,00	100,00	
9	Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1.000.000.000,00	983.075.989,00	98,31	1.000.000.000,00	100,00	
10	Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi dan Kab/Kota.	300.000.000,00	274.912.733,00	91,64	300.000.000,00	100,00	
11	Kegiatan Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	750.000.000,00	736.926.239,00	98,26	750.000.000,00	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata</b>	6.050.000.000,00	5.866.763.168,00	96,97	6.050.000.000,00	100,00	

## 8. BIRO UMUM

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NON URUSAN (EKS BAU)</b>						
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Umum</b>						
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	172.214.000	93,09	185.000.000	100,00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.500.000.000	5.535.029.757	85,15	6.500.000.000	100,00	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1.185.000.000	1.145.772.000	96,69	1.185.000.000	100,00	
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	700.000.000	666.035.247	95,15	700.000.000	100,00	

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	2.580.000.000	2.530.210.498	98,07	2.580.000.000	100,00	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	900.000.000	897.857.200	99,76	900.000.000	100,00	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	940.000.000	922.643.600	98,15	940.000.000	100,00	
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300.000.000	297.515.300	99,17	300.000.000	100,00	
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	400.000.000	391.500.696	97,88	400.000.000	100,00	
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000	91.475.000	45,74	200.000.000	100,00	
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	8.350.000.000	8.329.470.500	99,75	8.350.000.000	100,00	
12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	3.790.000.000	3.192.588.604	84,24	3.790.000.000	100,00	
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	5.925.000.000	5.705.145.656	96,29	5.925.000.000	100,00	
14	Kegiatan Peningkatan Olah Raga dan Seni	930.000.000	845.056.000	90,87	930.000.000	100,00	
15	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	5.205.000.000	3.979.979.612	76,46	5.205.000.000	100,00	
16	Kegiatan Pelayanan Keprotokolanan Biro Umum	1.820.000.000	1.692.423.194	92,99	1.820.000.000	100,00	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Biro Umum</b>						
17	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	9.001.000.000	8.931.547.163	99,23	9.001.000.000	100,00	
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	4.830.000.000	4.464.990.675	92,44	4.830.000.000	100,00	
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	500.000.000	473.613.968	94,72	500.000.000	100,00	
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.590.000.000	9.011.035.830	93,96	9.590.000.000	100,00	
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3.900.000.000	3.737.399.509	95,83	3.900.000.000	100,00	
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.750.000.000	1.647.277.360	94,13	1.750.000.000	100,00	
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	150.000.000	149.870.000	99,91	150.000.000	100,00	
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	940.000.000	829.791.100	88,28	940.000.000	100,00	
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	150.000.000	138.452.000	92,3	150.000.000	100,00	
26	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	22.145.000.000	21.424.702.840	96,75	22.145.000.000	100,00	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Biro Umum</b>						
27	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	390.000.000	357.230.000	91,6	390.000.000	100,00	

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Biro Umum</b>						
28	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	50.000.000	21.500.000	43	50.000.000	100,00	
29	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program Biro Umum	100.000.000	96.017.500	96,02	100.000.000	100,00	
	<b>Perpustakaan dan Kearsipan</b>						
	<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan - Biro Umum</b>						
30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan	25.000.000	20.808.000	83,23	25.000.000	100,00	
	<b>Fungsi Lainnya</b>						
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Umum</b>						
31	Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	150.000.000	134.826.693	89,88	150.000.000	100,00	
32	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	450.000.000	444.051.988	98,68	450.000.000	100,00	
33	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga	400.000.000	321.096.900	80,27	400.000.000	100,00	
34	Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah	330.000.000	311.454.829	94,38	330.000.000	100,00	
35	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	400.000.000	303.674.445	75,92	400.000.000	100,00	
36	Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.880.000.000	2.872.534.102	99,74	2.880.000.000	100,00	
37	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1.650.000.000	1.340.812.961	81,26	1.650.000.000	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata</b>	99.691.000.000	93.427.604.727	93,72	99.691.000.000	100,00	

### 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Urusan Umum Pemerintahan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II terutama untuk kegiatan LS;
- b. Perubahan Anggaran disahkan pada Triwulan IV sehingga dalam menyusun jadwal kegiatan lelang waktunya terbatas;

- c. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;

Strategi Pemecahan Masalah yang dilakukan sehingga hambatan dan kendala tersebut tidak menghambat dalam pencapaian target Urusan Umum Pemerintahan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan kegiatan apabila sudah dilaksanakan agar segera untuk diselesaikan proses administrasinya sehingga tidak menumpuk di semester II;
- b. Dalam perencanaan agar lebih terencana sehingga dalam Perubahan Anggaran tidak banyak melakukan perubahan dan lelang sebaiknya dilakukan diawal pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan pelatihan dan diklat teknis khusus atau tertentu bagi pegawai yang ada sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Sering melakukan koordinasi dengan berbagai bidang sehingga dapat menyamakan pemahaman dan persepsi dalam pelaksana tugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan;

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

##### **1) PENDAPATAN**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan di Akui pada saat kas di terima pada KASDA,. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **2) BELANJA**

Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda, Khusus melalui bendahara Pengeluaran, pengekuan belanja terjadi pada Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.

##### **3) ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikusai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi /sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian Aset ini tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

##### **4) KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada SKPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

#### 5) EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas Dana Diinventasikan.

### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD**

#### **a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

- 1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- 2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
  - c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.
- 5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.

**b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung dari tanggal perolehan.
- 3) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
- 4) Kas dan setara kas diakui pada saat :
  - a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
  - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
- 5) Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
- 6) Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.

**c. Kebijakan Akuntansi Investasi**

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- 3) Pengakuan investasi :
  - a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan



- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
  - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 4) Pengukuran Investasi
  - a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
  - b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian/pengungkapan
  - a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
  - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.
  - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

**d. Kebijakan Akuntansi Piutang**

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang

diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- 2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
- 3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

#### **e. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa :
  - a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
  - b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
  - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
  - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Persediaan diakui pada saat :
  - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
- 4) Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.
- 5) Persediaan disajikan sebesar :
  - a) biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
  - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - c) Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

**f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- 3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
  - a) Berwujud
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 4) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat

diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- 5) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
  - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
  - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
  - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
  - b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
- 8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).
- 9) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu

tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

- 10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- 11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
- 12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 13) Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca tetap diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

#### **g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan**

- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- 3) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 4) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

#### **h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- 2) Aset lainnya antara lain :
  - a) Aset tak berwujud
    - (1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Jenis aset tak berwujud antara lain : goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

(2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan anda.

(3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

b) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah

(1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

(2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

(3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c) Aset kemitraan dengan pihak ketiga

(1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

(2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

- d) Aset lain-lain
  - (1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
  - (2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
  - (3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

#### **i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi :

- 1) Kewajiban jangka pendek
  - a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhiungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
  - c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
  - d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK
- 2) Kewajiban jangka panjang
  - a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.

#### **j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

#### **k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

##### **1) Pendapatan LO**

- (a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.

##### **2) Pendapatan LRA**

- (a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode



tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

- (b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan dalam LRA dan LAK.

## **I. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer**

### **1) Beban**

- (a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- (b) Pengakuan dan pengukuran beban

#### **(1) Beban Operasi**

- Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/ TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
- Beban barang dan Jasa
- Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan yaitu pada saat barang telah diterima
- Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Beban buga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul

- Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.
  - Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.
  - Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
  - Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
  - Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung
- (2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

## 2) Belanja

- (a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- (c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :
- (1) LRA sebagai pengeluaran daerah
  - (2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi
  - (3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi
  - (4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informas.

## 3) Transfer

- (a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

- (b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

**m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan pengeluaran)**

- 1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian**

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- i. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.
- ii. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan**

**5.1.1.1. Pendapatan Daerah**

Total realisasi pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 1,812,174,800.00 atau 89.65 % dari target 2,021,500,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 realisasi pendapatan Asli daerah sebesar 2,236,180,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	2,021,500,000.00	1,812,174,800.00	89.65	2,236,180,000.00
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>2.236.180.000,00</b>	<b>92,21</b>	<b>1.940.000.000,00</b>

**5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Total realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 1,812,174,800.00 atau 89.65 % dari target 2,021,500,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 realisasi pendapatan Retribusi Daerah sebesar 2,236,180,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	2,021,500,000.00	1,812,174,800.00	89.65	2,236,180,000.00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>2.236.180.000,00</b>	<b>92,21</b>	<b>1.940.000.000,00</b>

**5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah**

Total realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 sebesar 1,812,174,800.00 atau 89.65 % dari target 2,021,500,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar 2,236,180,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	2,021,500,000.00	1,812,174,800.00	89.65	2,236,180,000.00
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>2.236.180.000,00</b>	<b>92,21</b>	<b>1.940.000.000,00</b>

#### 5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Total realisasi pendapatan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 1,615,674,800,- atau 92.28% dari target 1,750,900,000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 2,133,480,000. Untuk pendapatan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan dikarenakan :

- Tidak dipungutnya retribusi untuk VIP Roam Ahmad Yani Semarang sejak bulan Juni 2018 ( Lebaran ) dikarenakan berpindahannya bandara lama ke bandara baru (VIP Roam Ahmad Yani Semarang yang baru di kelola oleh PT. Angkasa Pura Persero).
- Kalah bersaing dengan tempat usaha yang sama dikarenakan dengan harga yang sama bahkan lebih mahal tetapi fasilitas yang diperoleh sangat ketinggalan (Gedung Pertemuan PKK dan Gedung Dharma Wanita Sriwijaya).
- Tempat yang terlalu jauh dari kota dan kesulitan transportasi ke Gedung Monumen PKK Ungaran (Gedung Pertemuan PKK).

Total realisasi pendapatan untuk Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Gedung Monumen PKK Ungaran (Asrama PKK Ungaran) Tahun Anggaran 2018 sebesar 113,550,000 atau 68.14% dari target 166,650,000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 102,700,000,- mengalami kenaikan dikarenakan :

- Kurang menariknya tempat atau fasilitas yang ada di Gedung Monumen PKK Ungaran (Asrama PKK Ungaran).
- Kalah bersaing dengan tempat usaha yang sama dikarenakan dengan harga yang sama bahkan lebih mahal tetapi fasilitas yang diperoleh sangat ketinggalan.
- Tempat yang terlalu jauh dari kota dan kesulitan transportasi ke Gedung Monumen PKK Ungaran (Asrama PKK Ungaran).

Total realisasi pendapatan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 82,950,000 atau 79.80% dari target 103,950,000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 0,- ( Nihil ) mengalami kenaikan dikarenakan untuk Tahun 2017 dimasukkan pada rekening belanja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang dan untuk Tahun 2018 dimasukkan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ada penambahan jenis belanja baru yaitu retribusi tempat parkir dan warung gayeng.

Adapun rincian dari retribusi sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang	1,750,900,000	1,615,674,800	92.28	2,133,480,000
Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa	166,650,000	113,550,000	68.14	102,700,000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	103,950,000	82,950,000	79.80	0
<b>Jumlah</b>	<b>2,021,500,000</b>	<b>1,812,174,800</b>	<b>89.65</b>	<b>2,236,180,000</b>

## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

### 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 206,717,935,940.00 atau 93.00% dari anggaran 222,284,604,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 181,346,314,797.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	106,395,595,000.00	98,808,534,150.00	92.87	100,407,404,174.00
Belanja Barang & Jasa	115,889,009,000.00	107,909,401,790.00	93.11	80,938,910,623.00
<b>Jumlah</b>	<b>222,284,604,000.00</b>	<b>206,717,935,940.00</b>	<b>93.00</b>	<b>181,346,314,797.00</b>

### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 98,808,534,150.00 atau 92.87 % dari anggaran 106,395,595,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 100,407,404,174.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	93,633,104,000.00	86,400,479,652.00	92.28	91.833.954.174,00
Belanja langsung Pegawai	12,762,491,000.00	12,408,054,498.00	97.22	8.573.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>106,395,595,000.00</b>	<b>98,808,534,150.00</b>	<b>92.87</b>	<b>100.407.404.174,00</b>

### 5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 107,909,401,790.00 atau 93.11% dari anggaran 115,889,009,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 80,938,910,623.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	7,986,729,000.00	7,733,010,582.00	96.82	6,009,708,715.00
Belanja Bahan/Material	898,100,000.00	834,027,596.00	92.87	518,256,150.00
Belanja Jasa Kantor	17,473,320,000.00	15,622,453,973.00	89.41	14,176,135,625.00
Belanja Premi Asuransi	745,000,000.00	708,386,873.00	95.09	541,961,500.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,732,000,000.00	4,221,518,917.00	89.21	3,195,815,089.00
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,945,292,000.00	2,703,679,270.00	91.80	2,362,276,315.00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,158,820,000.00	4,775,353,841.00	92.57	2,584,285,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	334,000,000.00	328,966,000.00	98.49	393,420,000.00
Belanja Sewa Alat Berat			-	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,907,370,000.00	2,742,362,000.00	94.32	2,707,763,000.00
Belanja Makanan dan Minuman	13,798,340,000.00	13,501,876,745.00	97.85	13,911,856,950.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	408,100,000.00	378,030,000.00	92.63	19,950,000.00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan			-	
Belanja Pakaian Kerja	106,650,000.00	103,800,000.00	97.33	248,160,000.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu	85,700,000.00	79,800,000.00	93.12	59,770,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	39,112,514,000.00	36,269,848,426.00	92.73	27,755,343,078.00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			-	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150,000,000.00	100,450,000.00	66.97	85,500,000.00
Belanja Pemeliharaan	17,192,134,000.00	16,076,715,317.00	93.51	5,274,671,701.00



	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jasa Konsultansi	1,402,000,000.00	1,343,123,250.00	95.80	668,867,500.00
Belanja Pengadaan Jasa Lainnya			-	
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			-	
Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga			-	
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	353,260,000.00	309,496,000.00	87.61	358,000,000.00
Belanja Hadiah Uang			-	
Belanja Hadiah Barang	99,680,000.00	76,503,000.00	76.75	67,170,000.00
Belanja Publikasi			-	
Belanja Barang dan Jasa BLUD			-	
<b>Jumlah</b>	<b>115,889,009,000.00</b>	<b>107,909,401,790.00</b>	<b>93.11</b>	<b>80,938,910,623.00</b>

#### 5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 30,374,386,003.00 atau 97.45% dari anggaran 31,167,750,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.976.163.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah			-	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	30,946,000,000.00	30,157,750,003.00	97.45	2,939,316,000.00
Belanja Gedung dan Bangunan			-	0.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	200,000,000.00	198,500,000.00	99.25	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	21,750,000.00	18,136,000.00	83.38	36,847,600.00
Belanja Aset Tak Berwujud			-	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>31,167,750,000.00</b>	<b>30,374,386,003.00</b>	<b>97.45</b>	<b>2,976,163,600.00</b>

##### 5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 0. atau 0% dari anggaran 0 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 0

##### 5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 30,157,750,003.00 atau 97.45% dari anggaran 30,946,000,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 2,939,316,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Alat-alat Besar	5,922,289,000.00	5,876,610,595.00	99.23	856,002,500.00
Alat-alat Angkutan	9,001,000,000.00	8,931,547,163.00	99.23	151,750,000.00
Alat-alat Bengkel			-	
Alat-alat Pertanian / Peternakan			-	
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	13,573,648,000.00	13,004,424,645.00	95.81	1,650,713,500.00
Alat-alat Studio dan Komunikasi	2,449,063,000.00	2,345,167,600.00	95.76	280,850,000.00
Alat-alat Kedokteran			-	
Alat-alat Laboratorium			-	
Alat-alat Keamanan			-	
<b>Jumlah</b>	<b>30,946,000,000.00</b>	<b>30,157,750,003.00</b>	<b>97.45</b>	<b>2,939,316,000.00</b>

#### 5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 0,00 atau 0 % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung			-	
Belanja Monumen			-	
<b>Jumlah</b>			-	

#### 5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 198,500,000.00 atau 99.25% dari anggaran 200,000,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Jalan dan Jembatan			-	
Bangunan Air / Irigasi			-	
Instalasi	200,000,000.00	198,500,000.00	99.25	-
Jaringan			-	
<b>Jumlah</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>198,500,000.00</b>	<b>99.25</b>	<b>-</b>

#### 5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 18,136,000.00 atau 83.38% dari anggaran 21,750,000.00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 36,847,600.00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Buku Perpustakaan	21,750,000.00	18,136,000.00	3.38	26,347,600.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			-	10,500,000.00
Hewan Ternak dan Tumbuhan			-	
<b>Jumlah</b>	<b>21,750,000.00</b>	<b>18,136,000.00</b>	<b>3.38</b>	<b>36,847,600.00</b>

### 5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar 235,280,147,143.00 sedangkan Tahun 2017 sebesar 182.086.298.397,00

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar 418,127,033,265.00 sedang saldo per 31 Desember 2017 sebesar 403.833.919.344,00

#### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar 410,635,316.53 sedang saldo per 31 Desember 2017 sebesar 380,456,185.00

##### 5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2018 sebesar 0 ( Nihil ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 8.582,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.582,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas BLUD	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>8.582,00</b>

##### 5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

###### a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan Kas di Bendahara hutang pihak ketiga (non SiLPA) pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayarkan ke pihak ketiga dan merupakan bukan bagian dari SiLPA Tahun 2018.

NO	URAIAN	2018	2017
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

**b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2018	2017
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

**c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain**

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2018 sebesar 0 (Nihil).

NO	URAIAN	2018	2017
1	Saldo akhir tahun 2017	Nihil	8.582
2			
	Jumlah	Nihil	8.582

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	Sudah dicairkan/diuangkan BPP	Nihil	Nihil
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

#### 5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

##### a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2018.

NO	URAIAN	2018	2017
1		Nihil	Nihil
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1		Nihil	Nihil
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

#### 5.2.1.1.2. Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2018 adalah NIHIL

#### 5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	2017
Piutang Pajak	0	0
Penyisihan Piutang Pajak	0	0
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

	2018	2017
Piutang Retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

	2018	2017
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
<b>Piutang Lainnya Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2018 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2018 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimukaper 31 Desember 2018 sebesar 364,801,719.53 sedang saldo per 31 Desember 2017 sebesar 318.089.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Asuransi BMD	364,801,719.53	318.089.250,00
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>364,801,719.53</b>	<b>318.089.250,00</b>

#### 5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian

terakhir. Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar 62.358.353 sedang saldo per 31 Desember 2017 sebesar 45,833,597.00 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak	40,088,100	42.787.915
Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan	5,745,497	12.532.438
<b>Jumlah</b>	<b>45,833,597</b>	<b>62.358.353</b>

**CATATAN :**

- **Terlampir Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan.**

**5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar NIHIL

**5.2.1.3. Aset Tetap**

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar 403.833.919.344,00 bertambah sebesar 14,293,113,921.00 atau 3.54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 403.833.919.344,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :**(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>403.833.919.344,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	30,374,386,003.00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	2,424,951,089.00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	1,332,993,356.00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>34,132,330,448.00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	14,355,218,983.00
Mutasi Keluar	Rp	5,483,997,544.00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>19,839,216,527.00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>418,127,033,265.00</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2018.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018 ( Data terlampir ).
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018 ( Data terlampir ).
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.



### 5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2018 sebesar 166,611,640,000.00 turun sebesar 993,000,000.00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 167.604.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Tanah	166,611,640,000.00	0,00	993,000,000.00	167.604.640.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>166,611,640,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,000,000.00</b>	<b>167.604.640.000,00</b>

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	167.604.640.000,00
<b>Penambahan</b>		0,00
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>167.604.640.000,00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	993,000,000.00
Koreksi	Rp	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>993,000,000.00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>166,611,640,000.00</b>

### 5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar 147,418,282,308.00 naik sebesar 15,480,707,021.00 atau 11.73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 131.937.575.287,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat-alat Besar	12,923,620,218.00	5,876,610,595.00	-	7,047,009,623.00
Alat-alat Angkutan	58,395,039,250.00	12,689,491,608.00	4,079,768,444.00	49,785,316,086.00
Alat-alat Bengkel dan Ukur	98,898,000.00	-	-	98,898,000.00

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	44,064,677,750.00	11,489,874,645.00	8,729,745,284.00	41,304,548,389.00
Alat-alat Studio Komunikasi dan Pemancar	19,398,675,063.00	2,345,167,600.00	2,341,224,315.00	19,394,731,778.00
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	103,690,000.00	-	153,925,000.00	257,615,000.00
Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat-alat Persenjataan	1,265,031,550.00	-	-	1,265,031,550.00
Alat-alat Komputer	11,168,650,477.00	1,514,550,000.00	3,130,324,384.00	12,784,424,861.00
Alat-alat eksplorasi	-	-	-	-
Alat-alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-	-	-
Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
Alat-alat Peraga	-	-	-	-
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
Alat-alat Rambu-Rambu	-	-	-	-
Alat-alat Olahraga	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>147,418,282,308.00</b>	<b>33,915,694,448.00</b>	<b>18,434,987,427.00</b>	<b>131.937.575.287,00</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	131.937.575.287,00
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	30,157,750,003.00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	2,424,951,089.00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	1,332,993,356.00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>33,915,694,448.00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	14,355,218,983.00
Mutasi Keluar	Rp	4,079,768,444.00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>18,434,987,427.00</b>
 <b>Grand Total</b>	 <b>Rp</b>	 <b>147,418,282,308.00</b>

### 5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar 100,482,406,070.00 turun sebesar 400,729,100.00 atau 0.40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 100,883,135,170.00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Bangunan Gedung	100,482,406,070.00	0,00	400,729,100.00	100,883,135,170.00
Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00
Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,482,406,070.00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,729,100.00</b>	<b>100,883,135,170.00</b>

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>100.883.135.170,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
 <b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	400,729,100.00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>400,729,100.00</b>
 <b>Grand Total</b>	 <b>Rp</b>	 <b>100,482,406,070.00</b>

#### 5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar 1,867,950,925.00 naik sebesar 198,500,000.00 atau 11.89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 1.669.450.925,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	1,867,950,925.00	198,500,000.00	0,00	1.669.450.925,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1,867,950,925.00</b>	<b>198,500,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.450.925,00</b>

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	1.669.450.925,00
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	198,500,000.00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	0
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>198,500,000.00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>1,867,950,925.00</b>

#### 5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar 1,746,753,962.00 naik sebesar 7,636,000.00 atau 0.44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 1.739.117.962,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>Bertambah</b>	<b>Berkurang</b>	<b>2017</b>
Buku Perpustakaan	1,340,094,620.00	18,136,000.00	0,00	1,321,958,620.00
Barang Bercorak	406,659,342.00	0,00	10,500,000.00	417,159,342.00
Kesenian/Kebudayaan				
Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1,746,753,962.00</b>	<b>18,136,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>1.739.117.962,00</b>

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pensiun menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	<b>1.739.117.962,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	18,136,000.00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Mutasi Masuk	Rp	0.00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0.00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0.00
Koreksi	Rp	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>18,136,000.00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	10,500,000.00
Koreksi	Rp	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>10,500,000.00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>1,746,753,962.00</b>

#### 5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>Bertambah</b>	<b>Berkurang</b>	<b>2017</b>
Konstruksi Pengerjaan Dalam	0	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Penjelasannya adalah sebagai berikut : Untuk Tahun 2018 Setda tidak ada konstruksi dalam pengerjaan. Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :  
**(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	0
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	0
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	0
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>

#### 5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar 156,968,458,131.85 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 157,614,692,609.39 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Alat-alat Besar	6,330,842,822.38	5,167,880,435.50
Alat-alat Angkutan	41,261,375,300.76	37,283,471,990.50
Alat-alat Bengkel dan Ukur	98,898,000.00	98,898,000.00
Alat-alat Pertanian	-	-

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	31,834,245,762.80	35,787,534,628.80
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17,018,701,143.00	18,311,338,298.00
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	101,512,000.00	247,529,000.00
Alat-alat Laboratorium	-	-
Alat-alat Persenjataan	1,253,631,550.00	1,247,931,550.00
Alat-alat Komputer	9,619,975,677.00	11,687,546,411.50
Alat-alat Eksplorasi	-	-
Alat-alat Pengeboran	-	-
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-
Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-
Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-
Alat-alat Peraga	-	-
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi	-	-
Alat-alat Rambu-Rambu	-	-
Alat-alat Olahraga	-	-
Bangunan Gedung	48,948,481,398.41	47,327,551,590.70
Monumen	-	-
Bangunan Menara	-	-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air / Irigasi	-	-
Instalasi	500,794,477.50	455,010,704.39
Jaringan	-	-
Aset Tetap Renovasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>156,968,458,131.85</b>	<b>157,614,692,609.39</b>

#### 5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar 16,945,480.00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0.00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	-	-
Kerjasama Pemanfaatan	-	-
<b>Aset Tak Berwujud</b>	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	-	-
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>16,945,480.00</b>	-
Aset Lain-Lain	16,101,718,983.00	3,079,493,356.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(16,084,773,503.00)	(3,079,493,356.00)
Penyusutan Aset Lain-Lain Netto	16,945,480.00	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>16,945,480.00</b>	-

#### 5.2.1.5.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0 ( setda tidak punya aset tidak berwujud )

#### 5.2.1.5.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0,00

#### 5.2.1.5.3. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar 16.101.718.983 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar 3.079.493.356,00 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Tanah Rusak Berat	-	-
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	16.101.718.983,00	2.990.493.356,00
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	-	-
Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Pemerintah	-	89.000.000,00
Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Pemerintah	-	-
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah	-	-
Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-
Aset Lain-lain Tanah	-	-
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	-	-
Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	-	-
Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.101.718.983,00</b>	<b>3.079.493.356,00</b>

#### 5.2.1.5.4. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar 16.945.480,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 3.079.493.356,00 dengan rincian sebagai berikut :



	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akumulasi Penyusutan Sewa	-	-
Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Pemanfaatan	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)	-	-
Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-
Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	16.945.480,00	2.990.493.356,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah.	-	89.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.945.480,00</b>	<b>3.079.493.356,00</b>

## **5.2.2. KEWAJIBAN**

Total Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 8,582.00

### **5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 8,582.00

#### **5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga**

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0

#### **5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0

## **5.2.3. EKUITAS**

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar 261,586,155,929.67 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 246,599,682,919.61

## **5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **5.3.1. PENDAPATAN-LO**

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2018.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 sebesar 1.812.174.800,00 turun sebesar 424.005.200,00 atau 18,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 2.236.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pendapatan Asli daerah	1.812.174.800,00	2.236.180.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.812.174.800,00</b>	<b>2.236.180.000,00</b>

### 5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar 1.812.174.800,00 turun sebesar 424.005.200,00 atau 18,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 2.236.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pendapatan Pajak Daerah	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	1.812.174.800,00	2.236.180.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.812.174.800,00</b>	<b>2.236.180.000,00</b>

#### 5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar 1.812.174.800,00 turun sebesar 424.005.200,00 atau 18,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 2.236.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Retribusi Jasa Umum	0	0
Retribusi Jasa Usaha	1.812.174.800,00	2.236.180.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.812.174.800,00</b>	<b>2.236.180.000,00</b>

#### 5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2018 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		

	2018	2017
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain		
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2018 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

### 5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2018 sebesar 220.884.920.988,44 naik sebesar 28.608.678.548,36 atau 14,88 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 192.276.242.440,07

#### 5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per per 31 Desember 2018 sebesar 220.884.920.988,44 naik sebesar 28.608.678.548,36 atau 14,88 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 192.276.242.440,07

	2018	2017
Beban Pegawai	98.808.534.150,00	100.407.404.174,00
Beban Persediaan	9.777.117.619,00	7.522.648.543,00
Beban Jasa	25.473.933.467,47	21.072.432.625,00
Beban Pemeliharaan	20.298.234.234,00	8.470.486.790,00
Beban Perjalanan Dinas	36.269.848.426,00	27.755.343.078,00
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Penyusutan/Amortisasi	14.197.172.761,96	10.929.927.643,07
Beban Lain-Lain	16.060.080.330,00	16.117.999.587,00
<b>Jumlah</b>	<b>220.884.920.988,44</b>	<b>192.276.242.440,07</b>

#### 5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar 98.808.534.150,00 turun sebesar 1.598.870.024,00 atau 1,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 100.407.404.174,00

	2018	2017
Gaji dan Tunjangan	36.779.365.492,00	40.695.277.339,00
Tambahan Penghasilan PNS	49.621.114.160,00	51.138.676.835,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-
Belanja insentif Pemungut Pajak	-	-
Honorarium PNS	6.514.850.000,00	5.468.150.000,00
Honorarium Non PNS	5.893.204.498,00	3.105.300.000,00
Beban Pegawai BOS	-	-
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>98.808.534.150,00</b>	<b>100.407.404.174,00</b>

#### 5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar 9.777.117.619,00 naik sebesar 2.254.469.076,00 atau 29,97% dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar 7.522.648.543,00

	2018	2017
Beban Habis Pakai	7.758.315.397,00	6.009.708.715,00
Beban Bahan/Material	840.814.537,00	518.256.150,00
Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	378.030.000,00	19.950.000,00
Beban Pakaian Kerja	103.800.000,00	248.160.000,00
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	79.800.000,00	59.770.000,00
Beban Makanan Dan Minuman	539.854.685,00	599.633.678,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
Beban Hadiah Barang	76.503.000,00	67.170.000,00
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>9.777.117.619,00</b>	<b>7.522.648.543,00</b>

#### 5.3.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2018 sebesar 25.473.933.467,47 naik sebesar 4.401.500.842,47 atau 20,89% dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar 21.072.432.625,00

	2018	2017
Beban Jasa Kantor	15.622.453.973,00	14.176.135.625,00
Beban Premi Asuransi	661.674.403,47	541.961.500,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.775.353.841,00	2.584.285.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	328.966.000,00	393.420.000,00

	2018	2017
Beban Sewa Alat Berat	-	-
Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.742.362.000,00	2.707.763.000,00
Beban Jasa Konsultansi	1.343.123.250,00	668.867.500,00
Beban Pengadaan Jasa Lainnya	-	-
<b>Jumlah Beban Jasa</b>	<b>25.473.933.467,47</b>	<b>21.072.432.625,00</b>

#### 5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 sebesar 20.298.234.234,00 naik sebesar 11.827.747.444,00 atau 139,63 % dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar 8.470.486.790,00

	2018	2017
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	4.221.518.917,00	3.195.815.089,00
Beban Pemeliharaan	16.076.715.317,00	5.274.671.701,00
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>20.298.234.234,00</b>	<b>8.470.486.790,00</b>

#### 5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 sebesar 36.269.848.426,00 naik sebesar 8.514.505.348,00 atau 30,68% dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar 27.755.343.078,00

	2018	2017
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.041.692.366,00	17.954.249.376,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.944.087.580,00	8.986.270.502,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.284.068.480,00	814.823.200,00
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>36.269.848.426,00</b>	<b>27.755.343.078,00</b>

#### 5.3.2.1.6. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0

	2018	2017
<b>Beban Hibah</b>	-	-
Beban Hibah Kepada Pemerintah	-	-
Beban Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat	-	-
Beban Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	-	-
Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
<b>Jumlah Beban Hibah</b>	-	-

#### 5.3.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0

	2018	2017
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Barang dan Jasa	-	-
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 5.3.2.1.8. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar 14.197.172.761,96 naik sebesar 3.267.245.118,89 atau 29,89% dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar 10.929.927.643,07

	2018	2017
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	12.113.077.341,14	8.866.569.962,20
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	2.021.658.907,71	2.021.658.907,73
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	45.783.773,11	41.698.773,14
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	16.652.740,00	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>14.197.172.761,96</b>	<b>10.929.927.643,07</b>

#### 5.3.2.1.9. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar 16.060.080.330,00 turun sebesar 57.919.257,00 atau 0,36 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 16.117.999.587,00

	2018	2017
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>16.060.080.330,00</b>	<b>16.117.999.587,00</b>
Beban Cetak Dan Penggandaan	2.688.112.270,00	2.362.276.315,00
Beban Makanan Dan Minuman	12.962.022.060,00	13.312.223.272,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns	100.450.000,00	85.500.000,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	309.496.000,00	358.000.000,00
Beban Barang Dana BOS	-	-
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>16.060.080.330,00</b>	<b>16.117.999.587,00</b>

### 5.3.2.1.10. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 0

	2018	2017
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	-	-
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
<b>Beban Lain-Lain</b>	-	-
Beban Penyisihan Dana Bergulir (Investasi Non Permanen Lainnya)	-	-
Beban Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Beban Lain-Lain</b>	-	-

## 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 1. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan BMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 17 bidang tanah senilai Rp.166.611.640.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 18 bidang tanah senilai Rp.167.604.640.000,- di kurangi 1 bidang tanah senilai Rp. 993.000.000,- ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2018 Mutasi Tambah 0 bidang seluas\_ 0 \_m2 senilai Rp. 0,00, Mutasi Kurang 0 \_m2 senilai Rp. 0,00. Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal		Vol	Nilai
		18	167.604.640.000
No	Tambah	Vol	Nilai
1	Belanja Modal		
2	Belanja Barang/Jasa		
3	Hibah		
4	Mutasi Masuk		
5	Reklasifikas Aset Tetap		
6	Reklasifikas Aset Lainnya		
7	Koreksi/Penilaian		
<b>Jumlah Tambah</b>		-	-

No	Berkurang	Vol	Nilai
1	Ekstracomtable		
2	Mutasi Keluar	1	993.000.000
3	Reklasifikasi Aset Tetap		
4	Reklasifikasi Aset Lainnya		
5	Koreksi		
	<b>Jumlah Kurang</b>	<b>1</b>	<b>993.000.000</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>Vol</b>	<b>Nilai</b>
		<b>17</b>	<b>166.611.640.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Vol</b>	<b>Nilai</b>
		-	-

## 2. Peralatan dan Mesin

### a. Alat besar

Saldo Alat besar pada Laporan BMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 44 unit senilai Rp.12.923.620.218,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 39 unit senilai Rp.7.047.009.623,-. Di tambah Belanja Modal tahun 2018 5 unit senilai Rp. 5.876.610.595,-

### b. Alat Angkut (02.03)

Saldo BMD berupa Alat Angkut Laporan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 358 unit senilai Rp. 58.395.039.250,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 327 unit senilai Rp.49.785.316.086,- yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018.

**Mutasi Tambah** pada tahun 2019 dengan rincian: 2 unit kendaraan bermotor roda empat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 710.994.797,- bertambah 1 unit dari BPPD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.500.000.000,- bertambah 1 unit dari Dinas Kepemudaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.255.921.978,- bertambah 1 unit dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.228.000.000,- bertambah 1 unit dari



BPKAD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.327.034.314,- bertambah 1 unit dari Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.403.000.000,-

**Mutasi Kurang** pada tahun 2019 dengan rincian: 16 unit ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 1.998.003.356,- berkurang 4 unit ke DINKOMINFO Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 797.932.800,- berkurang 3 unit ke Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 990.932.500,- Rp. berkurang 1 unit ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 439.084.250,- berkurang 1 unit ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah senilai 105.500.000,- berkurang 1 unit ke Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 211.648.338,- berkurang 3 unit ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 334.600.000,-

c. Alat Bengkel

Saldo BMD berupa Alat Bengkel Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 2 unit dengan senilai 98.898.000,-

d. Alat Pertanian

Saldo BMD berupa Alat Pertanian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 0,- unit dengan nilai 0,-

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (02.06)

Saldo BMD berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 12.034 unit senilai Rp.44.064.677.750,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 17.370 unit senilai Rp.41.304.548.389,- yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018.

Belanja Modal APBD tahun 2018 sejumlah 957 buah senilai Rp.11.489.874.645,-, pada tahun 2018 sensus barang yang di keluarkan ke aset lainya karena rusak berat sejumlah 6.293 buah senilai Rp. 8.729.745.284,-

- f. **Alat Studio dan Komunikasi**  
Saldo BMD berupa Alat Studio dan Komunikasi Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 1.826 unit senilai Rp.19.398.675.063,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 2.057 unit senilai Rp.19.394.731.778,- yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018.  
Belanja Modal APBD tahun 2018, sejumlah 277 buah senilai Rp. 2.345.167.600,- ,  
Pada tahun 2018 sensus barang yang di keluarkan ke aset lainnya karena rusak berat sejumlah 508 buah senilai Rp. 2.341.224.315,
- g. **Alat Kedokteran**  
Saldo BMD berupa Alat Kedokteran Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 12 unit senilai Rp.103.690.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 46 unit senilai Rp. 257.615.000,-. yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018 Pada tahun 2018 mutasi tambah sejumlah 0 unit senilai Rp.0,-  
pada tahun 2018 sensus barang yang di keluarkan ke aset lainnya karena rusak berat sejumlah 34 buah senilai Rp. 153.925.000, dari mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.
- h. **Alat Laboratorium**  
Saldo BMD berupa Alat Laboratorium Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 0 unit senilai Rp 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 0 unit senilai Rp.0,-. yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018.
- i. **Alat Keamanan (3.07)**  
Saldo BMD berupa Alat Keamanan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 10 unit senilai Rp 1.265.031.550,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah,- 10 unit senilai Rp 1.265.031.550,-

..yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018.pada tahun 2018 mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,-

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal		Vol	Nilai
		21.749	131.937.575.287

  

No	Tambah	Vol	Nilai
1	Belanja Modal	1.483	30.157.750.003
2	Belanja Barang/Jasa		
3	Hibah		
4	Mutasi Masuk	7	2.424.951.089
5	Reklasifikas Aset Tetap		
6	Reklasifikas Aset Lainnya	15	1.332.993.356
7	Koreksi/Penilaian		
	<b>Jumlah Tambah</b>	<b>1.505</b>	<b>33.915.694.448</b>

  

No	Berkurang	Vol	Nilai
1	Ekstracomtable		
2	Mutasi Keluar	25	4.079.768.444
3	Reklasifikasi Aset Tetap		
4	Reklasifikasi Aset Lainnya	7.373	14.355.218.983
5	Koreksi		
	<b>Jumlah Kurang</b>	<b>7.398</b>	<b>18.434.987.427</b>

  

Saldo Akhir		Vol	Nilai
		<b>15.856</b>	<b>147.418.282.308</b>

  

Akumulasi Penyusutan		Vol	Nilai
		-	107.519.182.256

### 3. Gedung dan Bangunan

#### a. Gedung Bangunan

Saldo BMD berupa Gedung Bangunan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 44 unit senilai Rp.100.482.406.070,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 44 unit senilai Rp. 100.883.135.170,-.yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018. Pada tahun 2018 mutasi tambah Rp.0,-  
 Pada tahun 2018 mutasi kurang sejumlah 1 unit senilai Rp. 400.729.100,- ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

b. Bangunan Monumen

Saldo BMD berupa Gedung Bangunan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 tidak mempunyai aset bangunan monumen.

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal		Vol	Nilai
		44	100.883.135.170

  

No	Tambah	Vol	Nilai
1	Belanja Modal		
2	Belanja Barang/Jasa		
3	Hibah		
4	Mutasi Masuk		
5	Reklasifikas Aset Tetap		
6	Reklasifikas Aset Lainnya		
7	Koreksi/Penilaian		
	<b>Jumlah Tambah</b>	-	-

  

No	Berkurang	Vol	Nilai
1	Ekstracomtable		
2	Mutasi Keluar	1	400.729.100
3	Reklasifikasi Aset Tetap		
4	Reklasifikasi Aset Lainnya		
5	Koreksi		
	<b>Jumlah Kurang</b>	1	400.729.100

  

Saldo Akhir		Vol	Nilai
		43	100.482.406.070

  

Akumulasi Penyusutan		Vol	Nilai
		-	48.948.481.398

#### 4. Jalan, Irigasi Dan Jembatan

a. Jalan dan Jembatan

Saldo BMD berupa Jalan dan Jembatan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 tidak mempunyai aset Jalan dan Jembatan.

b. Bangunan Air Irigasi

Saldo BMD berupa Bangunan Air Irigasi Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 tidak mempunyai aset Bangunan Air Irigasi .

c. Instalasi

Saldo BMD berupa Instalasi Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sejumlah 59 unit senilai Rp.1.867.950.925,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah,- 58 unit senilai Rp.1.669.450.925,- yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018. k Belanja Modal APBD tahun 2018 sejumlah 1 buah senilai Rp.198.500.000,- 2018 mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,-

d. Jaringan

Saldo BMD berupa Jaringan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 tidak mempunyai aset Jaringan

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal		Vol	Nilai
		58	1.669.450.925
No	Tambah	Vol	Nilai
1	Belanja Modal	1	198.500.000
2	Belanja Barang/Jasa		
3	Hibah		
4	Mutasi Masuk		
5	Reklasifikas Aset Tetap		
6	Reklasifikas Aset Lainnya		
7	Koreksi/Penilaian		
<b>Jumlah Tambah</b>		<b>1</b>	<b>198.500.000</b>
No	Berkurang	Vol	Nilai
1	Ekstracomtable		
2	Mutasi Keluar		
3	Reklasifikasi Aset Tetap		
4	Reklasifikasi Aset Lainnya		
5	Koreksi		
<b>Jumlah Kurang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Saldo Akhir		Vol	Nilai
		<b>59</b>	<b>1.867.950.925</b>
Akumulasi Penyusutan		Vol	Nilai
		-	500.794.478

## 5. Aset Tetap lainnya

### a. Buku dan Perpustakaan

Saldo BMD berupa Buku dan Perpustakaan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sejumlah 14.205 buah senilai Rp.1.340.094.620,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah,- 14.084 buah senilai Rp.1.321.958.620,- yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018.

Dengan Belanja Modal APBD tahun 2018 sejumlah 121 buah senilai Rp.18.136.000,-

### b. Barang Bercorak Kebudayaan

Saldo BMD berupa Barang Bercorak Kebudayaan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sejumlah 72 buah senilai Rp.406.659.342,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah,- 73 buah senilai Rp.417.159.342,- yang dijadikan saldo awal per 2 Januari 2018.

Tahun 2018 Belanja Modal APBD sejumlah 0 unit senilai Rp.0,- berkurang 1 unit ke Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 10.500.000,

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal		Vol	Nilai
		14.157	1.739.117.962

No	Tambah	Vol	Nilai
1	Belanja Modal	121	18.136.000
2	Belanja Barang/Jasa		
3	Hibah		
4	Mutasi Masuk		
5	Reklasifikas Aset Tetap		
6	Reklasifikas Aset Lainnya		
7	Koreksi/Penilaian		
	<b>Jumlah Tambah</b>	<b>121</b>	<b>18.136.000</b>

No	Berkurang	Vol	Nilai
1	Ekstracomtable		
2	Mutasi Keluar	1	10.500.000
3	Reklasifikasi Aset Tetap		
4	Reklasifikasi Aset Lainnya		
5	Koreksi		
	<b>Jumlah Kurang</b>	<b>1</b>	<b>10.500.000</b>

Saldo Akhir	Vol	Nilai
	14.277	1.746.753.962

Akumulasi Penyusutan	Vol	Nilai
	-	-

## 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan BMD Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 0 ( karena di tahun 2018 tidak ada pekerjaan konstruksi di lingkup kantor Setda Provinsi Jawa Tengah ) maka saldo awal per 1 Januari 2018 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2018 sejumlah 0 buah senilai Rp. 0,-.

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Vol	Nilai
	-	-

No	Tambah	Vol	Nilai
1	Belanja Modal		
2	Belanja Barang/Jasa		
3	Hibah		
4	Mutasi Masuk		
5	Reklasifikas Aset Tetap		
6	Reklasifikas Aset Lainnya		
7	Koreksi/Penilaian		
	<b>Jumlah Tambah</b>	-	-

No	Berkurang	Vol	Nilai
1	Ekstracomtable		
2	Mutasi Keluar		
3	Reklasifikasi Aset Tetap		
4	Reklasifikasi Aset Lainnya		
5	Koreksi		
	<b>Jumlah Kurang</b>	-	-

Saldo Akhir	Vol	Nilai
	-	-

Akumulasi Penyusutan	Vol	Nilai
	-	-

## **BAB VI**

### **PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sekretariat Daerah (SETDA) merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. SETDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

#### **B. Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, SETDA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

#### **C. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

- a. SEKDA;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
  - a. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama;
    - a. Bagian Pemerintahan;
    - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;



- b. Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan;
    - c. Subbagian Fasilitas Penataan Wilayah; dan
    - d. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - b. Bagian Otonomi Daerah; dan
    - a. Subbagian Urusan Pemerintahan Dan Standar Pelayanan Minimal;
    - b. Subbagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
    - c. Subbagian Fasilitas Administrasi Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Bagian Kerjasama.
    - a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
    - b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Biro Hukum;
  - a. Bagian Perundang-undangan;
    - a. Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
    - b. Subbagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur; dan
    - c. Subbagian Pengkajian Dan Sosialisasi Produk Hukum.
  - b. Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan
    - a. Subbagian Sengketa Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
    - b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - c. Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
    - a. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
    - b. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
    - c. Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

- c. Biro Kesejahteraan Rakyat.
  - a. Bagian Keagamaan;
    - a. Subbagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
    - b. Subbagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - b. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
    - a. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan;
    - b. Subbagian Kesehatan; dan
    - c. Subbagian Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
  - c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan Dan Olahraga.
    - a. Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    - b. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil; dan
    - c. Subbagian Kepemudaan Dan Olahraga.
- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri atas :
  - a. Biro Perekonomian;
    - a. Bagian Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
      - a. Subbagian Perindustrian Dan Perdagangan;
      - b. Subbagian Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; dan
      - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
    - b. Bagian Badan Usaha Milik Daerah; dan
      - a. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan; dan
      - b. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Jasa Dan Produksi.
    - c. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata.

- a. Subbagian Perhubungan; dan
  - b. Subbagian Penanaman Modal Dan Pariwisata.
- b. Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam;
  - a. Bagian Infrastruktur;
    - a. Subbagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
    - b. Subbagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - b. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
    - a. Subbagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
    - b. Subbagian Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
  - c. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian.
    - a. Subbagian Ketahanan Pangan;
    - b. Subbagian Kelautan Dan Perikanan; dan
    - c. Subbagian Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan.
- c. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
    - a. Subbagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. Subbagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - c. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - a. Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- c. Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Subbagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- d. Asisten Administrasi, terdiri atas :
  - a. Biro Organisasi;
    - a. Bagian Kelembagaan.
      - a. Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
      - b. Subbagian Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
      - c. Subbagian Analisis Dan Formasi Jabatan; dan
      - d. Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
    - b. Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik; dan
      - a. Subbagian Tata Laksana;
      - b. Subbagian Pelayanan Publik; dan
      - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
    - c. Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.
      - a. Subbagian Akuntabilitas Kinerja;
      - b. Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
      - c. Subbagian Kepegawaian.
  - b. Biro Umum;
    - a. Bagian Rumah Tangga SETDA;
      - a. Subbagian Sarana Dan Prasarana;
      - b. Subbagian Pelayanan Rumah Tangga;
      - c. Subbagian Keuangan; dan
      - d. Subbagian Tata Usaha Biro.
    - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
      - a. Subbagian Liputan Dan Dokumentasi;
      - b. Subbagian Publikasi Dan Hubungan Media; dan
      - c. Subbagian Protokol.
    - c. Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pimpinan.

- a. Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur;
  - b. Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
  - c. Subbagian Materi Naskah Pimpinan; dan
  - d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.
- c. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
    - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya;
    - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi; dan
    - c. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
  - b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
    - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
    - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
    - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
  - c. Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan.
    - a. Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
    - b. Subbagian Analisis Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
    - c. Subbagian Penyusunan Program.

## **BAB VII P E N U T U P**

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Dengan laporan keuangan daerah ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, juga terdiri dari buku laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran/Rincian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transportasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Daftar Lampiran Tambahan**

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2018.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2018.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2018.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2018.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2018.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2018.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).